

# KESIAPAN GPAI SMP DALAM IMPLEMENTASI KTSP PAI

Neni Setianingsih

## *Abstract*

*The validation of Education Unit Level Curriculum/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) is one of some realization of autonomy implementation. The implementation of KTSP including the KTSP of Islamic religion education tends to be minimally implemented. Some of its indicators are, in fact, a great deal of the teachers of Islamic religion education/Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) have not been applied, developed, or implemented such curriculum in the school because of some factor dealing with their level of preparedness and understandability toward the KTSP. This article will describe how far the preparation of GPAI SMP in implementing of KTSP PAI and also supporting and obstacle factors in the implementation in schools.*

**Keywords:** GPAI SMP, KTSP PAI, implementation in school.

## I. PENDAHULUAN

Era reformasi telah mengubah sistem Pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Perubahan tersebut salah satunya ditandai oleh keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut pendidikan adalah salah satu yang didesentralisasikan, dengan kata lain, pendidikan dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut sejatinya tidak hanya dibaca dan dimaknai sebagai beralihnya kewenangan Pusat menjadi

---

Dra. Neni Setianingsih bekerja pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan - Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

kewenangan Pemerintah Daerah, namun yang lebih penting adalah terjadinya otonomi pendidikan pada sekolah. Otonomi sekolah diharapkan dapat mendorong sekolah melakukan restrukturisasi pengelolaan sekolah, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, menyiapkan infrastruktur yang mendukung berlangsungnya otonomi pendidikan, serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi lingkungan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau dikenal juga sebagai Kurikulum 2006 merupakan wujud nyata otonomi sekolah.

Dalam Permen Diknas No.24 Tahun 2006 diamanatkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (1) dapat menerapkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas No.23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2006/2007; (2) harus sudah mulai menerapkan paling lambat tahun 2009/2010; (3) bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkannya secara menyeluruh untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007; (4) satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan secara bertahap dalam waktu paling lambat 3 tahun.

Patut dipahami bahwa KTSP ini bukanlah kurikulum yang baru sama sekali dan berbeda dari kurikulum sebelumnya. KTSP merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diterapkan pada tahun 2004 maupun kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam KTSP ini tetap memberikan tekanan pada aspek kompetensi siswa, yang merupakan inti dari KBK.

Apapun nama kurikulum yang diterapkan, pada intinya kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan, isi serta proses pendidikan. Disamping kedua fungsi itu, kurikulum juga merupakan bidang studi, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan.<sup>1</sup> Menurut Mulyasa sebagaimana

---

<sup>1</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. 2008. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 4.

dikutip Khaerudin, kurikulum yang baik harus selalu berubah atau berkelanjutan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Hal yang amat berbeda dari penerapan kurikulum sebelumnya adalah KTSP memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada sekolah dan guru untuk merumuskan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi lingkungan, serta menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan tuntutan masyarakat (*stakeholders* atau pemangku kepentingan) yang senantiasa berubah, sehingga KTSP memungkinkan sekolah dapat mengembangkan potensi keunggulan lokal.

Namun demikian, keleluasaan sekolah untuk mengembangkan kurikulum tersebut harus tetap mengacu pada Standar Isi (*Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005*), Standar Kompetensi Lulusan (*Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005*), Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (*Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006*), serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2007. Permendiknas-permendiknas dan Panduan tersebut menjadi rambu-rambu sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulumnya.

Secara teoritis KTSP memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: (1) KTSP mendorong terwujudnya kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) KTSP mendorong Kepala Sekolah, Guru, dan manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) KTSP memungkinkan sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran atau muatan lokal tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi lingkungan; dan (4) KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat kurang lebih 20 % dari jam pelajaran yang selama ini berlangsung.<sup>3</sup>

Idealnya pengimplementasian KTSP termasuk dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam menuntut mutu SDM yang memadai, diantaranya: pemahaman guru secara komprehensif tentang konsep, penyusunan, implementasi KTSP serta ketersediaan sarana-prasarana yang mendukung implementasi KTSP.

Namun kenyataan di lapangan implementasi KTSP masih dihadapkan pada permasalahan klasik dunia pendidikan Indonesia, yaitu mutu

<sup>2</sup> Khaeruddin dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Jogjakarta: MDC Jateng dan Pilar Media, , h. 4.

<sup>3</sup> <http://duniaguru.com> diakses tanggal 13 November 2007.

SDM, terutama guru sebagai pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dari hasil pengamatan selintas yang dilakukan Parsaroan Siahaan, seorang pengamat pendidikan dan konsultan pada *Science Education Quality Improvement Project* (SEQIP), menyatakan bahwa sekolah umumnya belum siap dalam melaksanakan KTSP, dan Guru masih kebingungan dalam menjabarkan kebijakan KTSP ini. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal ini merupakan konsekuensi logis dari masih terbatasnya jangkauan sasaran sosialisasi KTSP yang dilakukan pemerintah.<sup>4</sup>

Sosialisasi KTSP yang selama ini dilakukan menurut sebagian guru pada sebuah SMA di Yogyakarta, lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat administratif. Sosialisasi dan diklat KTSP untuk GPAI SMP, baru dapat menjangkau tidak lebih dari 500 GPAI dari seluruh GPAI SMP yang berjumlah 21.216 orang,<sup>5</sup> begitupun sosialisasi KTSP terhadap Pengawas PAI juga masih amat terbatas. Selain aktivitas sosialisasi KTSP yang masih rendah menjangkau jumlah GPAI yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga kurang mendukung implementasi KTSP.<sup>6</sup> Sedangkan MGMP PAI belum dapat diharapkan kontribusinya meningkatkan pemahaman GPAI terhadap KTSP, karena lingkup MGMP PAI sendiri belum banyak yang memahami secara baik tentang penyusunan maupun pengembangan KTSP.

Sehubungan dengan hal tersebut permasalahannya adalah sejauhmana kesiapan GPAI SMP dalam pengimplemetasian KTSP PAI, apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian KTSP PAI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kesiapan GPAI dalam pengimplementasian KTSP PAI yang meliputi kesiapan: (a) non materil (pengetahuan GPAI tentang KTSP, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasiln belajar PAI. (b) materil (perangkat kurikulum, sarana prasarana dan pendidik), serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian KTSP PAI.

Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah survey dengan pendekatan kuantitatif dan didukung data yang

---

<sup>4</sup> <http://www.klik.galamedia.com> diakses tanggal 26 November 2007

<sup>5</sup> Departemen Agama, Bagian Data dan Informasi Pendidikan Ditjen Pendis, 2005-2006, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta, h.104.

<sup>6</sup> [Http://writingsdy.wordpress.com](http://writingsdy.wordpress.com) diakses tanggal 13 Mei 2007

diperoleh melalui pendekatan kualitatif untuk mempertajam analisis terhadap deskripsi data kuantitatif.

Sampel penelitian ini sebanyak 310 GPAI SMP Negeri dan Swasta yang tersebar pada 8 kab/kota di 7 propinsi, yaitu: Jawa Timur, Riau Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, dari jumlah populasi GPAI SMP di 7 propinsi tersebut sebesar 7.511 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *two stage sampling*.<sup>7</sup> Tahap pertama (*purposive*), memilih 1 kab/kota dari setiap propinsi. Tahap kedua (*random sampling*) memilih sekolah/SMP, dimana tiap sekolah dipilih 2 orang GPAI dan 1 orang Kepala Sekolah untuk dijadikan responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian instrument non test (kuesioner/angket, daftar isian, pedoman wawancara), serta kajian dokumen. Instrumen digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kesiapan GPAI SMP dalam mengimplementasikan KTSP PAI, serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan KTSP PAI. Kajian dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan administrasi pengembangan KTSP yang dilakukan SMP.

Data yang bersifat kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, sedangkan data yang bersifat kualitatif dianalisis menggunakan teknik kategorisasi data dan penafsiran. Untuk menafsirkan data kuantitatif menurut Sujana (2002) dapat digunakan *analisis skor nilai ideal*, yaitu skor rata-rata dikalikan seratus kemudian dibagi skor maksimum. Dengan rumus tersebut nilai pencapaian responden diklasifikasikan sebagai berikut:

90 – 100	= Sangat Baik	55 – 64	= Kurang
80 – 89	= Baik	0 – 54	= Sangat Kurang
65 – 79	= Cukup		

## II. Hasil Penelitian

### A. Identitas Lembaga

#### 1. Status Sekolah

Dilihat dari status sekolah, sebanyak 213 sekolah sample (68,71%) berstatus negeri dan 97 (31,29%) berstatus swasta.

<sup>7</sup>Paul S. Levy and Stanley Lamaslow. 1999. *Sampling of Populations*: John Wiley and Sons, Inc. p. 464

## 2. Akreditasi

Dilihat dari tingkat akreditasi, maka sekolah sampel yang telah terakreditasi A mencapai 57,69%, selebihnya 33,85% telah terakreditasi B, dan 8,46% terakreditasi C.

## B. Kesiapan Pengimplementasian KTSP PAI

### 1. Kesiapan Non Materil

Pembahasan tentang kesiapan non materil berkaitan dengan kesiapan GPAI SMP dalam pengimplementasian KTSP meliputi: pengetahuan GPAI tentang KTSP, kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran, kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran, dan kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran PAI.

#### a. Pengetahuan GPAI tentang KTSP

Diketahui bahwa tingkat pengetahuan GPAI tentang KTSP secara keseluruhan indikator baru mencapai kategori *cukup* (71,60). Adapun aspek yang penting untuk diperhatikan perihal indikator pengetahuan GPAI tentang KTSP yaitu pengetahuan GPAI tentang landasan pengembangan KTSP. Ini dapat dilihat dari prosentase skornya yang diambang kurang. Menurut penilaian kepala sekolah, tingkat pengetahuan GPAI tentang KTSP juga mencapai kategori cukup, yaitu 3,89 (77,80). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan GPAI tentang KTSP yang berkategori cukup tersebut diperkuat oleh penilaian kepala sekolah.

Pengetahuan GPAI tentang KTSP yang baru mencapai kategori cukup (71,60) menuntut untuk ditingkatkan, karena kurikulum merupakan segenap pengalaman belajar yang harus dilalui dalam proses pendidikan. Sedangkan pengalaman belajar itu sendiri senantiasa mengalami penyempurnaan selaras dengan perkembangan zaman serta tantangan-tantangan yang bakal dihadapi siswa pada masa yang akan datang.

Pemahaman serta penguasaan kurikulum merupakan suatu keharusan bagi seorang guru, tak terkecuali GPAI, terutama dalam pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kurikulum. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan GPAI tentang KTSP agar pendidikan agama berhasil dengan optimal, guru pendidikan agama harus bersikap proaktif dan dibarengi dengan keterpaduan pembinaan dari Tim Pengembang Kurikulum. Menurut Muhaimin kriteria guru agama yang proaktif diantaranya adalah siap untuk mengembangkan profesi secara berkesinambungan agar ilmu dan keahliannya

tidak *out of date*. Sebagai implikasinya guru agama akan *concern* dan komitmen dalam peningkatan studi lanjut mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, diskusi serta pelatihan (Muhaimin, 2002: 110).

*b. Kesiapan GPAI dalam Perencanaan Pembelajaran*

Diketahui bahwa tingkat kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran PAI secara keseluruhan indikator telah mencapai kategori *baik* (84.71). Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu aspek penyusunan modul remedial dan aspek penyusunan modul pengayaan. Menurut penilaian kepala sekolah, tingkat kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran juga telah mencapai kategori *baik*, yaitu 4.35 (87.14). Ini menunjukkan bahwa kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran selaras dengan penilaian kepala sekolah.

*c. Kesiapan GPAI dalam Pelaksanaan Pembelajaran*

Diketahui bahwa tingkat kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran PAI secara keseluruhan indikator telah mencapai kategori *baik* (82,00). Adapun aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI adalah: aspek pengelolaan waktu untuk menggali pengalaman pembelajaran siswa, pemanfaatan perpustakaan dalam pembelajaran, aspek penugasan kepada siswa dalam pembelajaran, penggunaan alat bantu pembelajaran, pengembangan aspek ketrampilan proses dan perbaikan pembelajaran berdasarkan penelitian tindakan kelas, dilihat dari prosentase skornya masih dalam kategori cukup. Menurut penilaian kepala sekolah, tingkat kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran juga telah mencapai kategori *baik*, yaitu 4.09 (81.82). Ini menunjukkan bahwa kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkategori *baik* itu selaras dengan penilaian kepala sekolah.

Adanya aspek kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran menyiratkan perlunya dukungan sarana pembelajaran yang memadai melalui pengadaan atau subsidi penyediaan sarana teknologi informasi serta koleksi buku perpustakaan penunjang pembelajaran PAI. Disamping itu GPAI harus bersikap proaktif, yakni mampu keluar dari kondisi dan aturan yang ada untuk berusaha mencari celah yang mampu dilaksanakan bersama-sama para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya seperti penciptaan suasana religius di sekolah serta kegiatan non

formal lainnya, dengan demikian pelaksanaan pembelajaran PAI diharapkan dapat lebih baik.

*d. Kesiapan GPAI dalam evaluasi Pembelajaran*

Diketahui bahwa tingkat kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran PAI secara keseluruhan indikator telah mencapai kategori *baik* (84.47). Adapun aspek yang penting untuk diperhatikan tentang kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran PAI adalah tentang pengadministrasian hasil belajar siswa, pengayaan untuk siswa yang telah mencapai SM/ KD dan penyampaian laporan hasil belajar kepada orangtua, dilihat dari prosentase skornya masih dalam kategori cukup. Menurut penilaian kepala sekolah, tingkat kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran mencapai kategori baik, yaitu 4.33 (86.61). Ini menunjukkan bahwa kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran yang berkategori baik itu diperkuat dengan penilaian kepala sekolah.

*e. Kesiapan GPAI pada Aspek Non Materiil Berdasarkan Status Sekolah*

Tabel 01: Kesiapan Non Materiil Berdasarkan Status Sekolah

No	Kesiapan SMP Negeri	rerata Skor	Kesiapan SMP Swasta	r errata Skor
01	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,69 (73,75)	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,56 (71,30)
02	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,32 (86,46)	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,04 (80,94)
03	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	4,11 (82,12)	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	3,97 (79,56)
04	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,29 (85,90)	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,23 (84,52)
	Total Kesiapan Non material SMP Negeri	4,10 (82,05)	Total Kesiapan Non material SMP Swasta	3,95 (79,00)

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa berdasarkan status sekolah, tingkat kesiapan non materiil SMP negeri memiliki rerata skor lebih tinggi dibandingkan SMP swasta, namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, hal ini menyiratkan tingginya tanggung jawab GPAI swasta--mengingat kompensasi yang diterima GPAI swasta berbeda jauh di bawah yang diterima GPAI negeri--dalam implementasi KTSP PAI.

*f. Kesiapan GPAI pada Aspek Non Materiil Berdasarkan Wilayah*

Tabel 02: Kesiapan Non Materiil Berdasarkan Wilayah

No	Kesiapan SMP Kota	rerata Skor	Kesiapan SMP Kabupaten	rerata Skor
1	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,65 (73,15)	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,60 (72,00)
2	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,23 (84,77)	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,25 (85,02)
3	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	4,05 (80,90)	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	4,09 (81,88)
4	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,33 (86,57)	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,15 (83,10)
Total Kesiapan Non material SMP Kota		4,07 (81,30)	Total Kesiapan Non material SMP Kabupaten	4,02 (80,45)

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa berdasarkan wilayah tingkat kesiapan SMP di perkotaan memiliki rerata skor lebih tinggi dibandingkan tingkat kesiapan SMP di kabupaten, namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, hal ini menyiratkan kesamaan tanggung jawab GPAI kabupaten dan kota terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran PAI SMP.

*g. Kesiapan GPAI pada aspek Non Materiil berdasarkan Status Akreditasi Sekolah*

Tabel 03: Kesiapan Non Materiil Berdasarkan Akreditasi Sekolah

No	Kesiapan SMP Kota	rerata Skor Akreditasi A	rerata Skor Akreditasi B	rerata Skor Akreditasi C
1	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,66 (73,20)	3,53 (70,70)	3,31 (66,30)
2	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,32 (86,43)	4,16 (83,37)	4,18 (83,68)
3	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	4,29 (85,90)	4,04(80,80)	4,06 (81,20)
4	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,31 (86,27)	4,22 (84,37)	4,15 (83,00)
Total Kesiapan Non material atas Akreditasi		4,145 (82,90)	3,99 (79,75)	3,92 (78,50)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, status SMP yang berakreditasi A memiliki rerata skor lebih tinggi dibandingkan dengan SMP berakreditasi B dan C. Namun demikian nyaris tidak ada perbedaan rerata skor antara SMP berakreditasi B dengan SMP berakreditasi C. Ini menyiratkan bahwa tanggung jawab GPAI dari SMP dengan kualifikasi B dan C tidak kalah dengan GPAI yang berasal dari SMP berakreditasi A.

*b. Kesiapan GPAI pada Aspek Non Materil berdasarkan Pengalaman Mengajar*

Tabel 04: Kesiapan Non Materil Berdasarkan Pengalaman Mengajar GPAI

No	Kesiapan SMP Kota	rerata Skor 21-keatas tahun	rerata Skor 11-20 tahun	rerata Skor 1-10 tahun
01	Pengetahuan GPAI tentang KTSP	3,65 (73,00)	3,81 (76,20)	3,67 (73,40)
02	Kesiapan GPAI dalam perencanaan pembelajaran	4,37 (87,38)	4,30 (86,00)	4,16 (83,20)
03	Kesiapan GPAI dalam pelaksanaan pembelajaran	4,18 (83,60)	4,14 (82,80)	4,03 (80,60)
04	Kesiapan GPAI dalam evaluasi pembelajaran	4,38 (87,78)	4,27 (85,40)	4,19 (83,80)
Total Kesiapan Non material atas Akreditasi		4,15 (82,90)	4,13 (82,60)	4,01 (80,25)

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa dilihat dari pengalaman mengajar GPAI, maka GPAI yang berpengalaman mengajar lebih dar 21 tahun, 11-20 tahun maupun yang berpengalaman mengajar 1-10 tahun memiliki rerata sekor yang relatif sama, yaitu dalam kategori baik. Idealnya GPAI dengan pengalaman mengajar lebih tinggi memiliki kesiapan mengajar yang jauh lebih baik.

2. Kesiapan Materil

Pembahasan tentang kesiapan materil berkaitan dengan kesiapan SMP dalam pengimplementasian KTSP adalah meliputi perangkat kurikulum, keadaan dan kondisi sarana dan prasarana, alat bantu pembelajaran, perpustakaan, bahan ajar, sarana komunikasi dan ketenagaan.

*a. Perangkat Kurikulum*

Kepemilikan perangkat kurikulum sebagai sumber acuan dalam pembelajaran PAI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 05: Perangkat Kurikulum

No	Indikator	N	%	Ket.
1	Kepemilikan buku PAI sesuai standar isi	268	86.45	
2	Kepemilikan buku PAI sesuai SKL	219	70.65	
3	Kepemilikan buku panduan pengembangan KTSP	265	85.48	
4	Kepemilikan buku panduan sistem penilaian PAI	241	77.74	

Berdasarkan tabel di atas dipahami bahwa, kepemilikan GPAI tentang perangkat kurikulum menunjukkan sebagian besar GPAI telah memiliki buku PAI sesuai standar isi dan buku panduan pengembangan silabus, yaitu telah mencapai 86,45% dan 85,48%, diikuti kepemilikan buku panduan system penilaian dan buku PAI sesuai SKL, yaitu mencapai 77,74% dan 70,65%. Di sini terdapat 14% sampai dengan 30% GPAI yang tidak memiliki jenis perangkat kurikulum sebagaimana tersebut di atas, sebagai sumber acuan dalam pembelajaran PAI. Keadaan ini tentunya berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran yang akan dicapai sesuai standar nasional pendidikan khususnya pada aspek standar isi dan standar penilaian. Keadaan dan kondisi ini tidak jauh berbeda ketika dikonfirmasi dengan pihak kepala sekolah dalam persoalan kepemilikan GPAI tentang perangkat kurikulum.

*b. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana*

Ketersediaan, kondisi sarana dan prasarana dalam menopang pelaksanaan KTSP PAI di SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 06: Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Indikator	N	%	Keterangan
1	Ketersediaan ruang praktek pembelajaran PAI	252	81.29	
2	Ketersediaan masjid / musalla	276	89.03	
3	Ketersediaan perangkat ibadah	273	88.06	
Kondisi				
No	Indikator	memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1	Kondisi ruang praktek pembelajaran PAI	59.35%	28.38%	12.25%
2	Kondisi masjid / musalla	68.06%	26.12%	5.81%
3	Kondisi perangkat ibadah	44.84%	44.52%	10.65%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan masjid/mushalla/ rumah/ ruang ibadah di hampir seluruh sekolah daerah sasaran penelitian mencapai 89.03%, diikuti ketersediaan perangkat ibadah dan ketersediaan ruang praktek pembelajaran PAI yang mencapai 88.06% dan 81.29%. Berbeda dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalam menopang pelaksanaan KTSP yang telah mencapai di atas 80 % , kondisi sarana dan prasarana yang memadai hanya sekitar 44% sampai dengan 68% , selebihnya dalam kondisi kurang memadai dan tidak memadai, terutama kondisi perangkat ibadah, ruang praktek pembelajaran dan ruang ibadah.

*c. Ketersediaan dan Kondisi Alat Bantu Pembelajaran PAI*

Tabel 07: Ketersediaan dan Kondisi Alat Bantu Pembelajaran PAI

No	Indikator	N	%	Keterangan
1	Ketersediaan alat bantu pembelajaran	229	73.80	
Kondisi				
No	Indikator	Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1	Kondisi alat bantu pembelajaran PAI	28.71%	54.52%	17.09%

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan alat bantu pembelajaran dalam membantu pelaksanaan KTSP PAI di sekolah, mencapai 73.80%. Adapun kondisi alat bantu pembelajaran PAI cenderung kurang memadai yaitu mencapai 54.52%, hanya 28.71% yang menyatakan memadai, bahkan 17.09% kondisi alat bantu pembelajaran PAI dinyatakan tidak memadai. Ini menyiratkan bahwa kondisi alat bantu pembelajaran PAI kurang mendukung dalam pelaksanaan KTSP PAI di sekolah.

*d. Ketersediaan dan Kondisi Perpustakaan*

Tabel 08: Ketersediaan dan Kondisi Perpustakaan

No	Indikator	N	%	Keterangan
1	Ketersediaan perpustakaan untuk memenuhi pembelajaran PAI	287	92.58	
Kondisi				
No	Indikator	Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1	Kondisi fisik perpustakaan	32.58%	58.03%	8.38%
2	Kondisi jumlah buku perpustakaan	23.55%	65.16%	11.29%
3	Kondisi buku penunjang pelaksanaan KTSP PAI	32.58%	60.65%	6.77%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan perpustakaan dalam menopang pelaksanaan KTSP PAI di sekolah mencapai 92,58%. Namun demikian, kondisi perpustakaan ini cenderung kurang memadai dari segi fisik, yaitu mencapai 58.03%, hanya 32.58% yang menyatakan memadai, bahkan 8.38% kondisi perpustakaan dinyatakan tidak memadai. Selanjutnya kondisi buku-buku dalam menunjang pelaksanaan KTSP PAI juga cenderung kurang memadai yaitu mencapai 60,65%, hanya 32.58% yang menyatakan memadai, bahkan 6.77% dinyatakan tidak

memadai. Ini mengandung arti bahwa kondisi perpustakaan belum seluruhnya mendukung pelaksanaan KTSP PAI di sekolah.

*e. Ketersediaan dan Kondisi Bahan Ajar*

Tabel 09: Ketersediaan dan Kondisi Bahan Ajar

No	Indikator	N	%	Keterangan
1	Ketersediaan bahan ajar	289	93.22	
Kondisi				
No	Indikator	Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1	Kondisi bahan ajar	48.38%	48.06%	3.55%

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa ketersediaan bahan ajar menurut GPAI telah menunjang pelaksanaan KTSP PAI di sekolah, yaitu mencapai 93.22%. Kondisi bahan ajar antara yang memadai dan yang kurang memadai sama-sama mencapai 48% hanya selisih 0,3% saja, serta masih terdapat 3.55% yang kondisinya dinyatakan tidak memadai. Ini menyiratkan bahwa kondisi bahan ajar cenderung kurang mendukung pelaksanaan KTSP PAI di sekolah.

*f. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Komunikasi*

Tabel 10: Ketersediaan dan Kondisi Sarana Komunikasi

No	Indikator	N	%	Keterangan
1	Ketersediaan sarana komunikasi	243	78.38	
Kondisi				
No	Indikator	Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1	Kondisi sarana komunikasi	38.70%	40.32%	20.96%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana komunikasi/ telephone menurut GPAI cukup menunjang pelaksanaan KTSP PAI di sekolah, yaitu mencapai 78.38%, kondisi sarana komunikasi kurang memadai mencapai 40.32%, terdapat 38.71% yang menyatakan memadai, dan bahkan 20.96% kondisi sarana komunikasi dinyatakan tidak memadai. Ini mengandung arti bahwa kondisi sarana komunikasi kurang mendukung dalam pelaksanaan KTSP PAI di sekolah. Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden dapat disimpulkan hal ini disebabkan

oleh kondisi sarana komunikasi tersebut umumnya belum dapat digunakan untuk mengakses internet yang dibutuhkan untuk siswa dan guru dalam memperkaya pengetahuan PAI.

*g. Pendidik*

Dilihat dari latar belakang akademis dan rasio jumlah GPAI dalam melaksanakan KTSP di sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11: Ketenagaan

No	Indikator	N	%	Ket.
1	Latar belakang akademik GPAI	297	95.80	
		Kondisi		
No	Indikator	ideal	Kurang ideal	Tidak ideal
1	Rasio jumlah GPAI dengan jumlah siswa	72.25 %	22.25%	5.48%

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari latar belakang aka-demis GPAI, 95.80% sesuai dengan standar ketenagaan yaitu berijasah S.1. Dilihat dari rasio jumlah GPAI dengan jumlah siswa menunjukkan 72,25% sudah ideal, 22,25% kurang ideal dan 5,48% tidak ideal. Ini artinya bahwa dilihat dari latar belakang akademis dan rasio jumlah GPAI sebagian besar telah mendukung, namun belum seluruhnya menopang pelaksanaan KTSP di sekolah, karena masih terdapat beberapa persen kondisinya kurang ideal.

**C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan KTSP PAI di Sekolah**

1. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengembangan Silabus

Pengembangan silabus berbasis KTSP bagi guru-guru PAI tidak mudah terutama bagi guru yang belum memahami KTSP. Berikut ini dideskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat GPAI SMP dalam mengembangkan silabus berbasis KTSP:

*a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*

MGMP adalah organisasi non struktural di lingkungan Depdiknas. MGMP adalah sebuah forum atau wadah kegiatan profesional guru-guru mata pelajaran sejenis di tingkat kabupaten/kota. Anggota MGMP adalah semua guru mata pelajaran sejenis baik negeri maupun swasta (untuk tingkat satuan pendidikan SMP dan SMA). Melalui wadah ini,

para guru dapat berkomunikasi, berkonsultasi, serta saling bertukar informasi serta pengalaman.

Keberadaan MGMP sangat membantu GPAI dalam mengembangkan silabus. Pernyataan ini didukung oleh sebagian besar kepala sekolah dan GPAI baik di SMP negeri maupun swasta yang menyatakan pentingnya organisasi ini (MGMP) dalam mengembangkan silabus berbasis KTSP. Mereka merasakan bahwa keberadaan MGMP sangat membantu guru dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya terutama dalam pengembangan silabus. Walaupun hasil pengembangan silabus ini cenderung seragam, namun diharapkan guru memiliki kreativitas sendiri dalam mengembangkan silabus dengan melihat kondisi dan kebutuhan sekolahnya.

Dilihat dari jumlah GPAI yang sudah mengikuti kegiatan MGMP, GPAI di SMP negeri lebih banyak dibanding dengan guru PAI di SMP swasta. Hanya sedikit GPAI swasta yang sudah bergabung dengan organisasi guru ini baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Hal ini tentu berpengaruh pada kelancaran guru dalam mengembangkan silabus.

Beberapa kepala sekolah, terutama kepala SMP Negeri, sepakat dengan argumen diatas bahwa GPAI terutama di SMP Negeri sudah banyak yang bergabung dalam MGMP di tingkat kabupaten yang dikoordinir oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), walaupun masih ada beberapa yang belum mengikuti kegiatan di MGMP. Mereka terus mendorong GPAI agar mengikuti kegiatan di MGMP karena diyakini bahwa organisasi ini adalah wadah yang baik dalam mengembangkan profesionalisme guru. Segala macam problematika yang berkaitan dengan pembelajaran bisa didiskusikan atau dikonsultasikan di dalamnya agar memperoleh pemecahan yang maksimal. Di organisasi ini para GPAI berkumpul dan berdiskusi tentang permasalahan atau penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan pengembangan silabus.

Meski keberadaan MGMP memiliki nilai positif yakni membantu dalam mengembangkan silabus, namun dengan adanya MGMP tersebut justru bagi guru yang kurang bersemangat untuk meningkatkan kreativitas cenderung mengikuti program yang telah dibuat oleh teman sejawat dalam forum MGMP. Kehadiran pengawas/ tim pengembang kurikulum sangat dibutuhkan dalam meminimalisir kondisi tersebut, sehingga

seluruh GPAI termotivasi untuk mengembangkan silabus sesuai karakteristik sekolah, siswa serta lingkungan sekolah.

*b. Contoh Silabus dari BSNP*

Salah satu peran dan tanggungjawab BSNP dalam pengembangan silabus adalah membuat contoh silabus yang efektif dan efisien, serta mudah diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Contoh pengembangan silabus dari BSNP ini menjadi pegangan bagi sebagian GPAI baik negeri maupun swasta. Dengan adanya contoh ini guru memiliki gambaran untuk mengembangkan silabus. Silabus dari BSNP ini menjadi pedoman bagi sebagian guru terutama guru-guru PAI di SMP swasta dalam mengembangkan silabus. Dengan berpegang pada pedoman tersebut banyak guru yang sudah memahami cara mengembangkan silabus sendiri bersama guru lainnya di sekolah masing-masing dan di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhannya. Silabus BSNP tersebut hanya sebagai rambu-rambu dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal demikian sudah banyak dilakukan oleh guru-guru PAI, terutama di SMP negeri. Dengan contoh silabus tersebut, mereka mengembangkannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dan biasanya dilakukan bersama-sama dengan rekan guru mata pelajaran sejenis melalui organisasi MGMP.

Contoh silabus BSNP ternyata juga menjadi penghambat bagi kreativitas guru dalam pengembangan silabus. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak GPAI SMP yang hanya menyalin silabus yang dibuat oleh BSNP, tanpa pengembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi sekolahnya. Guru-guru yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang tidak mau bersusah-payah untuk mengembangkan dirinya baik guru yang mengajar di SMP negeri maupun SMP swasta.

*c. Sosialisasi atau Pelatihan Pengembangan Silabus berbasis KTSP*

GPAI, terutama yang mengajar PAI di SMP negeri, sudah banyak yang telah mengikuti pelatihan dalam penyusunan dan pengembangan silabus, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan GPAI dalam pengembangan silabus PAI. Tetapi GPAI yang mengajar PAI di SMP swasta masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang cara mengembangkan silabus berbasis KTSP. Hal ini tentu berdampak pada minimnya pengetahuan yang dimiliki guru PAI dalam pengembangan silabus. Dengan kata lain banyak GPAI yang belum

memahami KTSP, terutama yang berkaitan dengan pengembangan silabus berbasis KTSP. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan beberapa kepala sekolah swasta bahwa guru-guru PAI belum bisa mengembangkan silabus secara optimal karena kurangnya pelatihan-pelatihan bagi GPAI SMP swasta.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penyusunan RPP mengacu pada hakekat, fungsi, prinsip, dan prosedur pengembangan serta cara mengukur efektivitas pelaksanaannya dalam pembelajaran. Penyusunan RPP ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengembangan silabus yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) banyak faktor pendukung dan faktor penghambat bagi GPAI. Faktor-faktor tersebut antara lain :

*a. Adanya kolaborasi antara guru-guru PAI dari beberapa SMP, baik negeri maupun swasta.*

Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam wadah yaitu MGMP. Sebagian besar guru dan kepala SMP berpendapat bahwa keberadaan MGMP juga merupakan wadah yang strategis dan sangat mendukung dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Melalui wadah ini diharapkan persoalan dapat diminimalisir dan diatasi termasuk bagaimana menyasiasi kompetensi yang diuraikan dalam kurikulum dan mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metoda dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

*b. Adanya format RPP berbasis KTSP*

Format penyusunan RPP yang telah dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum memudahkan guru dalam menyusun RPP. Dengan contoh format tersebut, guru-guru merasa mendapatkan pegangan dalam menyusun RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Format RPP KTSP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, dalam penyusunan RPP perlu didukung dengan ketersediaan sumber belajar yang akan digunakan dan pedoman penilaian dalam melaksanakan evaluasi pada proses dan akhir pembelajaran.

Banyak GPAI SMP baik negeri maupun swasta yang menyatakan bahwa dengan adanya contoh RPP KTSP, mereka merasa lebih mudah dalam membuat RPP sendiri. Sebagian guru PAI mencontek persis contoh yang ada, namun ada GPAI yang sudah dapat membuat RPP KTSP sendiri dengan tetap berpedoman pada kompetensi dasar dan standar isi dari BSNP. Mereka ini umumnya adalah guru-guru PAI yang bergabung dalam MGMP atau guru-guru yang memiliki kelompok diskusi dengan sesama GPAI baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Keberadaan contoh RPP juga dapat menjadi faktor penghambat guru-guru PAI dalam penyusunan RPP. Mereka hanya menyalin RPP yang dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum, tanpa mengembangkannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing, sementara kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah berbeda-beda.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembelajaran PAI

Pembelajaran berbasis KTSP merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis KTSP :

#### *a. Kompetensi guru*

Dalam penelitian ini hanya beberapa kepala sekolah baik dari SMP negeri maupun swasta yang menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. Kepala sekolah dan GPAI SMP cenderung melihat faktor fisik seperti kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran.

#### *b. Sarana dan prasarana sekolah*

Tidak bisa dipungkiri bahwa sarana dan prasarana sekolah cukup penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran seperti kondisi gedung, laboratorium, perpustakaan dan ruang ibadah yang memadai. Rata-rata responden SMP negeri dan beberapa responden SMP swasta menyatakan bahwa SMP negeri di kabupaten dan kota memiliki sarana dan prasarana sekolah yang cukup menunjang jalannya proses pelaksanaan pembelajaran. Namun untuk SMP swasta, sebagian masih memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga

menghambat proses pembelajaran berbasis KTSP, terutama buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran PAI dan ruang praktek ibadah.

*c. Ketersediaan sumber belajar*

Sumber belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber-sumber belajar dapat berupa pesan (informasi/bahan ajar seperti buku paket, LKS, dll); orang (guru, guru pembimbing, dan nara sumber lainnya); alat/perlengkapan (perangkat keras, seperti : komputer, radio, televisi, VCD/DVD dan sebagainya); pendekatan/metode/teknik (diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi dan sejenisnya); dan lingkungan.

Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran peserta didik. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan bermasyarakat. Jika GPAI jeli mengamati lingkungan di sekitar maka sesungguhnya banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar peserta didik. Jika dikaitkan dengan pembelajaran dalam konteks KTSP, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar kiranya penting dilakukan sehingga peserta didik tidak hanya belajar secara tekstual-verbalistik, tetapi dapat pula belajar secara kontekstual dengan kehidupan nyata yang sangat diperlukan siswa dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Data di lapangan menunjukkan bahwa baru sebagian kecil SMP, terutama di SMP swasta yang memiliki sumber belajar yang memadai. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh sekolah. Tidak seperti di SMP swasta, sebagian besar SMP negeri sudah memiliki media belajar yang cukup memadai karena biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pembelajaran yang berbasis KTSP.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Evaluasi Hasil Belajar Siswa

Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, atau penilaian akhir satuan pendidikan. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar berbasis KTSP, ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi guru-guru PAI antara lain :

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan evaluasi belajar yang diperoleh GPAI di SMP negeri berbeda dengan GPAI di SMP swasta. Sebagian guru di SMP negeri mengatakan bahwa rata-rata siswa juga belajar agama diluar sekolah sehingga hasil evaluasinya baik. Selain hal tersebut faktor pendukung lainnya adalah adanya bank soal yang sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Beberapa kepala sekolah di SMP negeri menyatakan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi adalah evaluasi hasil belajar siswa sesuai dengan indikator maupun sesuai dengan program yang telah dibuat oleh GPAI. Sementara itu bagi kepala sekolah dan guru SMP swasta, faktor yang mendukung pelaksanaan evaluasi hasil belajar adalah penguasaan GPAI dalam teknik penilaian berbasis KTSP, perangkat evaluasi tersedia, adanya ulangan umum bersama, dan adanya dukungan dari orang tua siswa.

Selain faktor pendukung yang memudahkan atau memperlancar dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar berbasis KTSP terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi GPAI dalam melakukan evaluasi berbasis KTSP seperti pemahaman GPAI dalam evaluasi/penilaian berbasis KTSP yang belum maksimal/baik. Hal ini banyak dikeluhkan oleh banyak kepala SMP swasta dan beberapa kepala SMP negeri. Faktor penghambat lainnya adalah siswa kurang siap dalam pelaksanaan evaluasi seperti yang diungkapkan GPAI di SMP swasta. Akibat kekurangsiapan tersebut banyak siswa yang tidak dapat menuntaskan kompetensi dasarnya sehingga perlu remedial. Di samping faktor di atas, lemahnya kontrol orang tua terhadap pendidikan anaknya terutama pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembelajaran PAI di sekolah dan berpengaruh pada hasil atau nilai PAI siswa.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Kesiapan GPAI SMP dalam implementasi KTSP PAI pada aspek *non materil*.
  1. Secara umum menunjukkan kategori baik (80.70), namun ada beberapa aspek masih berkategori cukup sehingga memerlukan

- perhatian dan tindak lanjut terutama pada aspek pengetahuan GPAI tentang KTSP.
2. Belum semua GPAI menyusun modul pengayaan terhadap siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal/KD, serta belum semua GPAI menyusun modul remedial untuk menindaklanjuti siswa yang belum mencapai ketuntasan minimal/KD.
  3. Belum semua GPAI memanfaatkan teknologi informasi dan perpustakaan dalam pembelajaran, serta belum selalu melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan penelitian tindakan kelas.
- B. Kesiapan GPAI SMP dalam pengimplementasian KTSP pada aspek *materiil* adalah pada umumnya sekolah yang menjadi sasaran penelitian telah memiliki perangkat kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, perpustakaan, bahan ajar serta sarana komunikasi, namun kondisinya kurang memadai, seperti kurangnya peralatan peribadatan dan jumlah koleksi buku penunjang PAI.
- C. Faktor pendukung dan penghambat dalam kesiapan pengimplementasian KTSP PAI:
1. MGMP memiliki peran penting dalam pengembangan silabus dan penyusunan RPP PAI, namun keberadaannya juga memiliki kekurangan karena sebagian anggotanya bersikap pasif sehingga kurang dan cenderung tidak mandiri dalam pengembangan kurikulum.
  2. Keberadaan contoh silabus dari BSNP dan format RPP dari Tim Pengembang Kurikulum, disamping memiliki nilai positif yakni memudahkan, keberadaannya juga memiliki kekurangan, yakni menghambat kreatifitas guru.
  3. Sosialisasi KTSP selama ini lebih banyak menjangkau GPAI Negeri dan baru sedikit yang menjangkau GPAI swasta.

### SUMBER BACAAN

- Badan Standar Nasional Pendidikan (2007): *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta.
- Departemen Agama (2005-2006): *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan. Bagian Data Dan Informasi Pendidikan Ditjen Pendis*, Jakarta.

- Hamalik, Oemar (2007): *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Khairuddin, dkk. (2007): *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Penerbit PT. Pilar Media bekerja sama dengan Madrasah Development Center (MDC) Jawa Tengah, Semarang.
- Levy, Paul S dan Stanley Lameslow (1999): *Sampling of Populations*, John Willey and Sons, Inc.
- Muhaimin, et.all (2002); *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, Enco. (2007): *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung, Penerbit PT. Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_ (2002): *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi*. Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_ (2005): *Implementasi Kurikulum 2004: Panduan Pembelajaran KBK*. Penerbit Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_ (2002): *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2008): *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Susilo, Joko (2007): *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.